

SKRIPSI

MELANI DWI HAPSARI

**ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
MOBIL BEKAS**

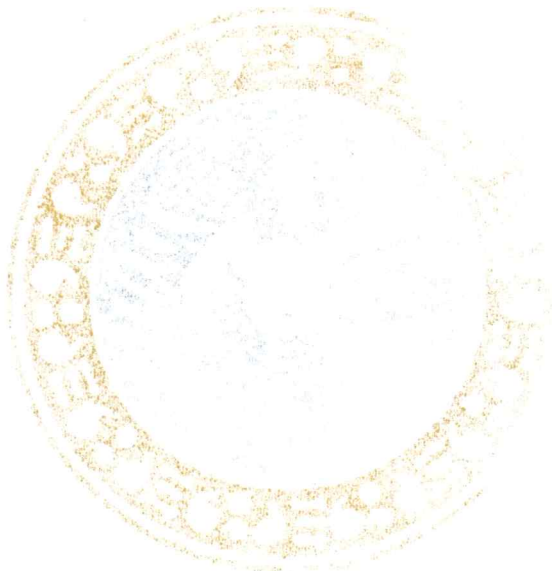


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

SKRIPSI

MELANI DWI HAPSARI

ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
MOBILE BEKAS



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2002

**ASPEK HUKUM PENYELESAIAN
SENGKETA DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI MOBIL BEKAS**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Bambang Sugeng Ariyadi S., S.H., M.H.
NIP. 132049476

Penyusun,



Melani Dwi Hapsari
NIM. 039814651

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2002

THE EFFECTIVENESS OF THE
WOMEN'S EMPOWERMENT
BASED PROBLEM SOLVING

PROPOSAL

FOR THE DEGREE OF MASTER OF
SOCIAL SCIENCE IN
SOCIAL WORK

NAME

STUDENT ID

DEPARTMENT OF
SOCIAL WORK

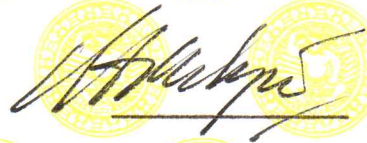
INSTITUTION OF
SOCIAL WORK

STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE
WOMEN'S EMPOWERMENT
BASED PROBLEM SOLVING

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2002**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. H. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M.



Anggota : 1. Bambang Sugeng Ariyadi S., S.H., M.H.



2. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.



3. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.H.



1994-1995: 3-480000

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The *Agrobacterium* strains were grown in YEA medium for 24 h at 28 °C. The cell concentration was adjusted to 1.0 × 10⁸ cells/ml. The cell suspension was mixed with the plant tissue and incubated for 24 h at 28 °C. The plant tissue was then cultured on the selective medium. The transformation efficiency was calculated as the number of transformants per 100 mg of plant tissue. The data are the mean ± SD of three independent experiments.

H = height; *L* = length; *T* = tail length; *W* = weight.

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

**Sometimes the Verythings
You're looking For,
is the onething
You can't see**

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

KATA PENGANTAR

Sujud syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas"**, untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam penulisan skripsi ini saya telah mendapatkan bantuan banyak sekali baik dari para dosen maupun dari keluarga dan rekan-rekan sesama mahasiswa. Melalui kesempatan ini saya akan mengucapkan banyak terima kasih, dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Bambang Sugeng Ariyadi S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dan Penguji, yang selama ini telah bersedia meluangkan waktunya membantu dan memberikan saran-saran untuk penulisan skripsi ini;
2. Bapak Dr. H. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M., selaku Ketua Tim Dosen Penguji, juga kepada Bapak Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., serta bapak Yohanes Sogar Simamora, S.H., MH, selaku Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan petunjuk, koreksi serta kritik yang berharga bagi penyempurnaan skripsi ini;

3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang telah memberikan pendidikan dan pembekalan ilmu selama saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada :

1. Mama dan Papa tercinta, yang selalu berdo'a untuk keberhasilan saya, serta buat kakakku yang "gendut". Khusus Papa, makasih atas artikel-artikelnya tentang perkembangan bisnis mobil di Indonesia (it helps me much!);
2. Rully-ku, atas seluruh sayang dan waktunya yang hampir setiap hari nemenin aku, selalu nganterin aku saat cari bahan-bahan skripsi, dan dah mo bantuin aku dalam penyempurnaan skripsi ini (thanks, it means a lot, and I know you're good)
3. Dessy, tempatku berbagi tawa dan tangis, thanks atas semua dukungan yang selalu bikin aku tegar (you're still my best friend);
4. Sarie, yang selama 4 tahun ini selalu bersama-sama denganku ke kampus, juga pada detik-detik waktu mo sidang udah nemenin aku selalu and ngajarin aku bacaan-bacaan do'a agar aku bisa lancar "bicara", thanks a lot loh;

5. Ayu "imut", yang selalu nemenin aku naik-turun tangga untuk nemuin dosen-dosen pembimbing dan penguji, juga atas spiritnya supaya aku ngga' grogi menghadapi beliau-beliau tersebut. Makasih ya;
6. Rina, yang waktu sidang dah mo nemenin; juga buat Tyas, Fessy, Nina, makasih atas perhatian kalian semua, dan atas dukungan moral waktu sidang maupun waktu penyusunan skripsi;
7. Prelly, buat contoh penyusunan skripsinya (berarti sekali loh), yang juga sempet nemenin waktu sidang, makasih ya;
8. Rully Helena, sobatku waktu di SMA 2 Surabaya, yang udah minjain buku paket Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, thanks loh;
9. Indrie, yang udah mo nganterin aku fotocopy skripsi walaupun saat itu matahari sangat panas;
10. Buat semua temen-temen mahasiswa/mahasiswi FH-UNAIR, terutama angkatan '98, yang asik-asik and kompak selalu;
11. Serta semua pihak yang turut membantu dan mendukung, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini.

Menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, pasti terdapat kekurangan-kekurangan. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis apabila ada kritik dan saran-saran yang disampaikan, guna perbaikan penulisan ilmiah yang akan datang.

Akhir kata, terbersit setitik harapan semoga skripsi ini dapat mempunyai arti dan manfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Surabaya, 17 Juni 2002

Penulis,

Melani Dwi Hapsari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	8
3. Alasan Pemilihan Judul	9
4. Tujuan Penulisan	10
5. Metodologi	11
6. Pertanggungjawaban Sistematika	13
BAB II UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA KONSUMEN	16
1. Dasar Gugatan	16
a. Gugatan Pembatalan Perjanjian di- Sertai Ganti Rugi berdasarkan Wanprestasi	16

b. Gugatan Ganti Rugi Berdasarkan	
Perbuatan Melanggar Hukum	21
2. Forum Penyelesaian Sengketa	
Menurut Undang-undang No. 8 Tahun	
1999	23

BAB III PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI

ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)

MEMBERIKAN RASA PERLINDUNGAN HUKUM	37
1. Keberadaan ADR di Indonesia dan	
Tujuannya	37
2. ADR Memberikan Rasa Perlindungan	
Hukum	39

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	46
2. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Jual beli di bidang otomotif, khususnya mobil bekas, dewasa ini semakin meningkat, apalagi setelah di berlakukannya perdagangan bebas di kawasan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sejak awal tahun 2001 ini. Kecenderungan semakin besarnya tingkat transaksi penjualan mobil bekas, juga didasarkan oleh faktor meningkatnya jumlah konsumsi mobil di dalam negeri, dan juga didukung oleh makin membaiknya kondisi perekonomian nasional. Hal ini terbukti dengan mulai diserbunya beberapa pusat penjualan dan pembelian mobil bekas di Surabaya. Jumlah transaksi yang dilakukan baik yang ingin membeli maupun menjual mobil relatif seimbang. Di satu sisi mereka yang ingin membeli mobil baru akan menjual mobil lamanya, sementara konsumen baru juga makin memburu mobil bekas¹.

¹ Harian Surya, Penjualan Mobil Naik 20 Persen, 9 Januari 2001, h. 3

Terdapat dua jenis kondisi mobil yang diperjual-belikan, yaitu mobil baru dan mobil bekas. Dalam hal membeli mobil baru relatif tidak ada masalah, selama jumlah uang yang tersedia mencukupi, tetapi untuk membeli mobil bekas membutuhkan kewaspadaan yang tinggi. Kekurang-waspadaan dapat "berbuntut" pada kekecewaan, sebab kondisi mobil bekas yang dibeli dapat saja tidak sesuai dengan yang diharapkan atau yang tampak pada pandangan pertama².

Seperti contoh kasus yang pernah terjadi dalam masyarakat, bahwa seorang konsumen membeli mobil bekas pada *showroom* mobil, dimana dikatakan oleh pihak penjual bahwa keadaan mobil baik dan istimewa, serta surat-suratnya tidak bermasalah. Kemudian dibuatlah suatu perjanjian bahwa telah terjadi transaksi jual beli mobil tersebut. Namun setelah mobil dipakai oleh pembeli (konsumen) selama kurun waktu kurang dari 1 minggu, ternyata keadaan mobil mulai bermasalah, sehingga oleh pembeli di bawalah mobil tersebut ke bengkel mobil. Dari bengkel inilah baru diketahui bahwa mobil yang baru dibeli tersebut ternyata mobil

² Anthonius Riyanto, Cermat Berinvestasi : Kiat Membeli Mobil Bekas, Kawan Pustaka, Jakarta, 2001, h. 5

yang cacat (pernah tabrakan keras) sehingga rangka kendaraan sudah tidak lurus lagi, dan dibuat sedemikian rupa hingga utuh kembali seperti semula.

Persoalan mulai timbul dalam hal perjanjian yang telah dibuat antara konsumen dengan produsen mobil bekas tersebut, karena pada kenyataan-kenyataan yang ada, faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran mereka akan hak-haknya masih rendah, hal ini disebabkan rendahnya pendidikan konsumen³. Sehingga konsumen pada umumnya berada dalam posisi yang lemah dan tidak berdaya. Konsumen bahkan sering tidak tahu bahwa hak-hak mereka telah dirampas.

Klausula baku merupakan sebuah contoh nyata dan sangat dekat dengan keseharian untuk menunjukkan bahwa konsumen selama ini telah "dizalimi" oleh pelaku usaha. Konsumen telah terbiasa dengan klausula baku dalam bon atau kuitansi yang berbunyi "barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan". Atas dasar ini pula, penjual dalam kasus jual beli mobil diatas tidak mau menanggung kerugian yang ada. Walaupun pihak konsumen telah berusaha menuntut

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

penjual agar mengganti kerugian yang dideritanya, tapi setelah tuntutan itu tidak dipenuhi, pihak konsumen tidak melanjutkannya dengan tuntutan hukum.

Salah satu asas hukum yang dianut oleh hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang berarti para pihak bebas mengadakan suatu perjanjian sepanjang perjanjian tersebut dibuat secara sah dan dengan itikad baik, serta sesuai dengan kebiasaan yang berlaku⁴, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 BW.

Namun kenyataan yang terjadi dalam perjanjian jual beli, konsumen tidak mengerti apa isi dan maksud sesungguhnya dari perjanjian yang didalamnya banyak terkandung klausula eksonerasi (exoneration clause), yang konsumen ketahui mereka harus menandatangani perjanjian sebagai tanda sepakat telah terjadinya jual beli mobil dengan pihak produsen. Dengan demikian bagi konsumen lebih banyak unsur tidak adanya kebebasan berkontrak dan berkehendak dalam suatu perjanjian jual beli mobil bekas tersebut.

⁴ Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 30

Dalam suatu perjanjian jual beli antara konsumen dengan produsen mobil bekas sebagaimana menurut Pasal 1457 jo. Pasal 1458 BW dimana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga kesepakatan, perjanjian jual beli memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut diteruskannya hak milik kebendaan yang telah diperjanjikan. Maka hubungan hukum antara konsumen dan pihak produsen dalam suatu perjanjian harus dicermati dan diatur sejelass mungkin agar kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang seimbang dalam hak dan kewajiban, dengan kata lain harus sesuai dengan ketentuan *bergaining position*.

Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen sejak lama telah dipikirkan dan diupayakan untuk diwujudkan dalam satu bentuk undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, merupakan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk

melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Diterangkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa "perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Perangkat hukum yang melindungi konsumen tersebut dimaksudkan untuk mendorong iklim bisnis dan usaha yang sehat melalui pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh produsen⁵.

Dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka terdapat kepastian hukum bagi konsumen dalam menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan atau diluar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 jo. Pasal 48 UU No. 8 Tahun 1999. Penyelesaian perlindungan konsumen di luar pengadilan diharapkan lebih cepat, lebih sederhana dan lebih efisien. Dalam Undang-Undang ini juga membuka peluang lebih besar bagi konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan dengan adanya pasal-pasal yang mengatur

⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta larangan-larangan bagi pelaku usaha (pihak produsen).

Dengan demikian dapat kita lihat bahwa dalam perjanjian jual beli mobil bekas tersebut, pihak produsen ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan di sisi lain ingin menekan sekecil-kecilnya tanggung jawab dengan memanfaatkan perbedaan tingkat pengetahuan yang ada pada konsumen yang kenyataannya masih sangat rendah.

Pembahasan skripsi ini merupakan suatu kajian tentang pentingnya kesadaran dan pendidikan serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas dengan produsen agar konsumen mengerti dan memahami hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Karena dalam prakteknya kepentingan konsumen ini sering dikesampingkan dan tidak dipenuhi oleh pihak produsen.

Berdasarkan uraian diatas, maka timbul permasalahan yang berkaitan dengan praktek jual beli mobil bekas dalam masyarakat. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan pembeli mobil, selaku konsumen, apabila pihak produsen mobil wanprestasi ?
- b. Apakah segala upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pembeli mobil, selaku konsumen, telah memberikan rasa perlindungan hukum ?

2. Penjelasan Judul

Rangkaian tulisan dalam bentuk skripsi ini diberi judul "Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas". Untuk dapat mengetahui arti dan maksud dari judul tersebut, maka penulis akan menjelaskannya satu persatu dan untuk selanjutnya dapat dilihat penjelasan dari judul tersebut secara keseluruhan.

Sengketa konsumen berarti setiap perselisihan antara konsumen dengan penyedia produk konsumen (barang/jasa), dalam hubungan hukum satu sama lain mengenai produk tertentu⁶.

Perjanjian menurut pasal 1313 BW adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan

⁶ AZ. NASUTION, Hukum dan Konsumen, cetakan I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, h. 178.

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Jual beli menurut pasal 1457 BW adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.

Sehingga maksud secara keseluruhan dari judul tersebut adalah segala upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan setiap perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha dalam transaksi jual beli mobil bekas.

3. Alasan Pemilihan Judul

Dengan diberlakukannya perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara sejak tahun 2001 yang menyebabkan semakin tinggi tingkat transaksi jual beli mobil, sehingga perlu adanya peningkatan kesadaran, pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat sebagai konsumen yang pada kenyataannya masih sangat rendah

bila dibandingkan dengan pelaku usaha agar konsumen dapat memperoleh perlindungan hak-haknya. Disamping itu untuk lebih mengetahui upaya yang dapat dilakukan konsumen bila haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

4. Tujuan Penulisan

Penyusunan penulisan skripsi ini, mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus.

a. Tujuan umum meliputi :

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Sebagai bahan kajian bidang hukum tentang kasus aktual yang terjadi pada masyarakat dalam dunia jual beli mobil, dimana dalam kasus tersebut terdapat pihak yang dirugikan.

b. Tujuan khusus meliputi :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan konsumen dalam penuntutan haknya.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pelaku usaha, apabila pihak konsumen merasa dirugikan serta berada di pihak yang lemah.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Pembahasan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah, kemudian mempelajari praktek dan kenyataan dalam transaksi jual beli mobil bekas di masyarakat dan untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam mempelajari dan membahas permasalahan yang ada.

b. Sumber Bahan Hukum

Untuk menunjang kelengkapan penulisan skripsi ini, sumber-sumber bahan hukum yang penulis gunakan adalah :

1. Bahan hukum *primer*, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bahan hukum *sekunder*, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa literatur-literatur, majalah-majalah, dan surat kabar. Disamping itu juga dilakukan wawancara langsung (baik dengan penjual maupun pembeli) dalam transaksi jual beli mobil bekas.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum baik primer maupun sekunder yang telah terkumpul, kemudian diseleksi berdasarkan skala prioritas berhubungan dengan masalah yang ada. Kemudian sumber bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasannya diolah dan dianalisis yang selanjutnya dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing kerangka pokok bahasan yang telah disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada

d. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang terkumpul dan terkait dengan obyek penulisan bahan skripsi ini, saya menggunakan metode deskriptis analisis, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan subyek dan obyek pengamatan pada saat ini berdasarkan fakta yang ada.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan dalam skripsi ini dikelompokkan dalam empat bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Bab I berjudul pendahuluan, yang berisi tentang uraian latar belakang dan garis besar permasalahan untuk memberikan pengetahuan dan gambaran umum mengenai materi, dengan tujuan mempermudah dan membuka pemahaman materi sebelum melanjutkan ke bab-bab selanjutnya. Bab I diawali dengan permasalahan (latar belakang dan rumusan masalah), penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan skripsi, metodologi dan pertanggungjawaban sistematika. Dengan adanya bagian ini, diharapkan

dapat mempermudah pembaca dalam memahami permasalahan sebagai obyek bahasan dalam skripsi ini.

Pada bab II, tentang Upaya penyelesaian sengketa atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Dalam bab ini, penulis akan memaparkan dasar-dasar gugatan konsumen, dan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pembeli mobil (selaku konsumen) sebagai pihak yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya perjanjian dengan baik oleh penjual.

Bab III mengenai upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan konsumen telah memberikan rasa perlindungan hukum. Pada bab III ini akan dijelaskan tentang keberadaan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di Indonesia. Disamping itu dijelaskan tentang jalan penyelesaian sengketa yang telah ditempuh oleh konsumen, akan dapat menjamin rasa perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga citra penegak hukum sebagai pembela kebenaran dan keadilan benar-benar terwujud.

Diakhiri Bab IV tentang Penutup akan dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran yang memaparkan hasil analisa dan pembahasan yang menjawab permasalahan utama dari penulisan skripsi ini,

termasuk saran kepada para penegak hukum agar benar-benar memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kreditur maupun debitur serta dapat memberikan penyelesaian sengketa secara cepat, adil, terbuka dan efektif.

BAB II

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA KONSUMEN

BAB II

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA KONSUMEN

1. Dasar Gugatan

a. Gugatan Pembatalan Perjanjian disertai Ganti Rugi berdasarkan Wanprestasi.

Isi suatu perjanjian pada prinsipnya adalah mengenai pengaturan hak dan kewajiban para pihak untuk saling memenuhi prestasinya masing-masing. Dengan kata lain, dalam setiap pelaksanaan perjanjian mempunyai suatu tujuan untuk terpenuhinya secara sempurna hal-hal yang telah disepakati dan diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak yang bersangkutan. Apabila salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian tidak melaksanakan atau menghindari pelaksanaan kewajibannya, maka ia selaku debitur telah melakukan wanprestasi, yaitu suatu keadaan dimana tidak dipenuhinya sesuatu yang diwajibkan dalam perikatan, dan dalam hal

tidak dipenuhinya kewajiban tersebut tidak dikarenakan oleh *overmacht* atau keadaan memaksa⁷. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya⁸.

Dalam kaitannya dengan perjanjian jual beli mobil bekas ini, *showroom* mobil sebagai pihak penjual sering melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian yang telah ia sepakati dengan konsumen, dalam hal mereka sering mengingkari tanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban yang seharusnya mereka laksanakan. Bentuk-bentuk wanprestasi yang sering kali dilakukan oleh *showroom* mobil, antara lain :

⁷ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Adi Bakti, Bandung, 1990, h. 204

⁸ Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1998, h. 45

a. Keterlambatan proses balik nama konsumen.

Dalam hal *showroom* mobil wanprestasi terlambat melakukan proses balik nama, maka yang terjadi adalah debitur wanprestasi dengan alasan terlambat memenuhi prestasi, sebab waktu penyerahan yang telah disepakati dalam perjanjian tidak dapat dipenuhi oleh pihak *showroom*.

b. Menyerahkan mobil yang didalamnya terdapat cacad tersembunyi, tetapi tidak dijelaskan sebelumnya.

Seperti contoh kasus yang tertuang pada latar belakang dimana *showroom* mobil sebagai pihak yang lebih tinggi secara teknik dan pengalaman dibidang otomotif, menyerahkan mobil yang didalamnya terdapat cacad tersembunyi, maka dapat dikatakan bahwa *showroom* mobil telah memenuhi prestasi, namun tidak sebagaimana diperjanjikan atau dengan tidak baik. Cacad tersembunyi adalah suatu keadaan barang yang cacad atau rusak, dimana cacad atau rusak itu tidak dapat dilihat oleh mata normal, dan untuk

melihatnya harus dibantu dengan alat atau hanya dapat dilihat oleh orang yang ahli. Kemudian dengan adanya cacad tersembunyi tersebut mengurangi fungsi penggunaan barang itu. Sehingga apabila pembeli mengetahui cacad itu sebelumnya, maka ia sama sekali tidak akan membeli mobil tersebut, atau membelinya dengan harga yang lebih murah dari harga sewajarnya (pasal 1504 BW). Hal ini jelas sangat merugikan konsumen selaku pembeli mobil cacad ini, sebab konsumen yang telah mengeluarkan uang puluhan juta untuk membeli mobil, juga harus rela mengeluarkan uang ratusan ribu lagi untuk membiayai perbaikan mobil tersebut, belum lagi bila mobil hendak dijual kembali, harga jualnya pasti merosot dan tidak sejajar dengan harga jual mobil "normal".

Dalam suatu perjanjian jual beli, penjual diwajibkan untuk menanggung terhadap cacad tersembunyi barang yang dijualnya, baik penjual mengetahui atau tidak adanya cacad tersebut, kecuali jika penjual dalam hal demikian telah

diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun dari barang yang dijualnya (pasal 1506 BW) ³⁰ (1508 BW)

Maka terhadap wanprestasi yang menimbulkan kerugian, kreditur (pembeli) dapat memilih tuntutan-tuntutan menurut Subekti :

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan disertai ganti rugi;⁹

Ganti rugi yang diatur dalam BW hanyalah ganti rugi atas kerugian yang bersifat materiil saja sedangkan kerugian moril biasanya timbul sehubungan dengan perbuatan melanggar hukum, tetapi juga dapat timbul karena wanprestasi. Dengan demikian munculnya rasa malu, hilangnya kepercayaan (kerugian moril) dapat dimintakan ganti rugi¹⁰.

⁹ *Ibid.* h. 53

¹⁰ J.H. Nieuwenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Surabaya, 1985, h. 58

b. Gugatan Ganti Rugi Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum.

Salah satu upaya hukum yang bisa dilakukan oleh konsumen sebagai usaha perlindungan diri terhadap kerugian yang disebabkan oleh *showroom* mobil adalah pengajuan gugatan ganti rugi ke pengadilan dengan alasan bahwa *showrocm* mobil telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Dalam pasal 1365 BW dinyatakan bahwa :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan bagi orang yang karena salahnya menertibkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Unsur-unsur melanggar hukum terdiri atas :

- a. perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum);
- b. kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan kausal);
- c. pelaku tersebut bersalah (kesalahan);

- d. norma yang dilanggar mempunyai "strekking" untuk mengelakkan timbulnya kerugian (relativitas)¹¹.

Unsur-unsur tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi secara bersama-sama (syarat kumulatif).

Dengan begitu pihak *showroom* berkewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila terbukti bahwa sebagai akibat dari perbuatannya, konsumen telah menderita kerugian. Namun tidak hanya sebatas itu, dalam pasal 1367 BW dinyatakan pula bahwa pihak *showroom* tidak hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian-kerugian yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya (pegawai *showroom*) atau disebabkan oleh barang-barang yang berada didalam pengawasannya.

¹¹ *ibid*, h. 118

2. Forum Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat pengaturan dan kepastian hukum mengenai upaya penyelesaian sengketa sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. Upaya penyelesaian sengketa konsumen tersebut dapat dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha (*showroom* mobil). Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan kepada *showroom* mobil melalui pengadilan atau lembaga di luar pengadilan apabila sesuai dengan kesepakatan para pihak (pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen).

Pada pembahasan skripsi ini, penulis akan lebih mengutamakan penggunaan pilihan penyelesaian sengketa melalui lembaga di luar Pengadilan atau pilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), sebab dengan metode ini proses penyelesaian sengketa akan lebih sederhana, cepat dengan biaya murah. Namun juga akan diterangkan sedikit penggunaan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan.

Secara jelas upaya penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui :

a. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (out of court dispute settlement). Salah satu proses penyelesaian sengketa adalah dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang dalam bahasa asing dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR), antara lain adalah negosiasi, mediasi, dan arbitrase yang diatur dalam Undang-undang Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- Negosiasi

Negosiasi menurut Fisher dan Ury (1991) merupakan komunikasi dua arah untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga.

Bila dikaitkan dengan pembahasan dalam skripsi ini, maka negosiasi dapat dilakukan oleh kedua

belah pihak (konsumen dan penjual) untuk menemukan penyelesaian dari masalah yang terjadi, yaitu atas transaksi pembelian mobil bekas tersebut.

- Mediasi

Adalah sebuah proses penyelesaian sengketa yang berdasarkan perundingan, dimana pihak ketiga netral yang disebut *mediator* terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan itu. *Mediator* bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa, namun *mediator* tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan selama proses perundingan berlangsung.

Sehingga dalam penyelesaian masalah jual beli mobil antara pihak showroom dan konsumennya ini, apabila setelah dilakukan negosiasi pada kedua belah pihak tetapi tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil), maka akan diperlukan bantuan pihak ketiga, yang disebut *mediator*, dengan harapan dapat menghasilkan

kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketanya. Apabila upaya penyelesaian sengketa dengan jalan mediasi tidak pula dapat memberikan penyelesaian yang berarti, maka dapat dilakukan bentuk upaya lain yaitu arbitrase.

- Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa :

"Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".

Arbitrase merupakan peradilan perdamaian untuk mencapai kesepakatan dalam perselisihan antara para pihak tentang hak-hak pribadi masing-masing pihak. Proses ini menyerahkan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian kepada pihak ketiga yang netral yang bertindak sebagai *arbitrator*. Arbitrator diberi

kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa dan berwenang mengambil putusan. Sifat putusan langsung final dan mengikat kepada para pihak¹².

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase mempunyai keunggulan tertentu dibandingkan dengan penyelesaian melalui lembaga peradilan, antara lain:¹³

- para pihak memiliki kebebasan dan otonomi luas dalam hal memilih dan mengangkat arbitrator yang menurut keyakinannya memiliki pengetahuan, keahlian serta pengalaman yang sesuai dengan substansi sengketa serta memiliki integritas moral dan kejujuran yang tidak diragukan. Adapun pada proses peradilan, pihak yang bersengketa tidak memiliki wewenang untuk memilih atau menentukan majelis hakim yang akan memeriksa sengketa, melainkan hal tersebut sepenuhnya

¹² M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan mengeni Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Cet. I, Citra Aditya Eakti, Bandung, 1997, h. 182

¹³ Basuki Rekso Wibowo, Hand Out: Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang di Indonesia, h. 2

ditentukan sendiri oleh instansi pengadilan yang bersangkutan.

- Para pihak berdasarkan suatu perjanjian memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan forum arbitrase (arbitrase ad hoc ataupun arbitrase institusional), dan dapat pula menentukan tempat arbitrase diadakan, yakni arbitrase di dalam negeri ataupun arbitrase diluar negeri (internasional). Adapun pada proses peradilan, para pihak dapat mengajukan sengketa ke pengadilan yang berkompeten.
- Pada proses arbitrase diharapkan mampu memberikan rasa aman terhadap para pihak yang bersengketa terutama apabila berasal dari negara yang berlainan, karena baik forum, aturan hukum, maupun arbitratornya merupakan pilihan para pihak sendiri. Sedangkan Pada proses peradilan terdapat kecenderungan umum adanya pemihakan terhadap mereka yang berasal dari negara di tempat peradilan diselenggarakan.

Secara keseluruhan dapat dilihat perbandingan keunggulan mediasi-arbitrase-litigasi, adalah sebagai berikut¹⁴:

SEGI PROSES	MEDIASI	ARBITRASE	LITIGASI
Yang Mengatur proses	Para Pihak	Arbitrator	Hakim
Prosedur	Informal	Agak formal	Formal
Jangka Waktu	Segera (3-6 Minggu)	Agak cepat (3-6 bulan)	Lama-lambat (5-12 tahun)
Biaya	sangat murah	terkadang mahal	sangat mahal
Aturan Pembuktian	tidak perlu	agak informal dan tidak teknis	sangat formal dan teknis
Publikasi	konfidensial dan pribadi	konfidensial dan pribadi	terbuka untuk umum
Hubungan Para Pihak	koperatif menyelesaikan sengketa	bermusuhan	bermusuhan
Fokus Penyelesaian	menuju ke depan	masalah masa lalu	masa lalu
Cara Negosiasi	kompromis	sama keras pada prinsip hukum	sama keras pada prinsip hukum
Komunikasi	memperbaiki yang sudah lalu	menghadapi jalan buntu	menghadapi jalan buntu
Hasil yang dicapai	sama-sama menang	kalah-menang	kalah-menang
Pemenuhar	dengan sukarela dan senang hati	selalu ditolak, mengajukan oposisi	ditolak dan mengajukan dalih

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, h. 230

Suasana Emosi	bebas emosi	emosional	sangat emosional
---------------	-------------	-----------	------------------

Berdasarkan bagan diatas, dapat diketahui bahwa sistem penyelesaian sengketa melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) lebih efektif daripada penyelesaian melaui lembaga pengadilan, sebab upaya penyelesaian sengketa dengan memilih jalur ADR akan lebih cepat, sederhana, dan biaya murah.

Upaya sengketa dengan memilih jalur di luar pengadilan ini dapat dikatakan sebagai pilihan jalur damai oleh para pihak. Apabila telah tercapai kata sepakat dalam penyelesaian sengketa tersebut, maka pihak yang wanprestasi (showroom mobil) diwajibkan membayar ganti rugi kepada konsumen.

Seperti yang dijelaskan dalam pasal 47 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

"Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen".

Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan pasal 47 undang-undang ini bahwa bentuk jaminan yang dimaksud adalah berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang celah merugikan konsumen tersebut.

b. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa gugatan melalui pengadilan hanya bisa dilakukan jika para pihak yang bersengketa tidak berhasil menemukan jalan keluar melalui upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Upaya gugatan melalui pengadilan ini merupakan satu-satunya cara yang akan ditempuh oleh konsumen apabila upaya di luar pengadilan benar-benar tidak berhasil.

Ada beberapa kemungkinan gugatan yang dapat diajukan oleh konsumen ke pengadilan apabila debitur wanprestasi, yaitu :

- gugatan pemenuhan prestasi
- gugatan pemenuhan prestasi dan ganti rugi
- gugatan ganti rugi

- gugatan pembubaran dan pembatalan perjanjian
- gugatan pembubaran dan pembatalan perjanjian dengan disertai ganti rugi

Seperti yang dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen bahwa pihak konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap pelaku usaha yang wanprestasi dengan mengacu pada ketentuan Peradilan Umum, yaitu Undang-undang No. 2 Tahun 1986.

Penyelesaian melalui lembaga pengadilan ini memiliki beberapa kelemahan yang sangat mempengaruhi turunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia, diantaranya adalah¹⁵ :

1. Penyelesaian sengketa lambat (waste of time)

Proses pemeriksaan dalam peradilan sangat formalistik dan teknis, disamping itu arus perkara semakin deras sehingga peradilan dijejali dengan beban yang terlampau banyak (over loaded). Akibatnya penyelesaian Perkara memakan waktu yang sangat lama dan lambat.

¹⁵ *ibid.* h. 240

2. Biaya perkara mahal (expensive)

Hal dikarenakan penyelesaian perkara dalam peradilan memakan waktu yang sangat lama, maka secara tidak langsung biaya perkara juga sangat mahal. Semakin lama penyelesaian, semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan.

3. Peradilan tidak tanggap (unresponsive)

Peradilan kurang tanggap atau tidak responsif dalam bentuk perilaku:

a. Membela dan melindungi kepentingan umum

Para hakim sering mengabaikan perlindungan terhadap kepentingan umum, dan tidak peduli terhadap kebutuhan masyarakat banyak;

b. Pengadilan dianggap sering berlaku tidak adil (unfair)

Pengadilan hanya memberi pelayanan dan kesempatan serta keleluasaan terhadap lembaga besar dan orang-orang kaya saja, sehingga kepentingan rakyat biasa dan golongan miskin tidak terlalu dipedulikan bahkan mendapat pelayanan dan perlakuan yang tidak manusiawi.

4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah

Putusan pengadilan tersebut tidak mampu memberikan penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak, tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman kepada pihak-pihak yang berperkara karena yang muncul dari putusan pengadilan tersebut adalah :

a. Win or Lose solution

Salah satu pihak pasti menang dan pihak yang lain pasti kalah.

b. Keadaan menang-kalah dalam berperkara tidak pernah membawa kedamaian tetapi menimbulkan bibit dendam dan permusuhan serta kebencian. Itu sebabnya putusan pengadilan pada umumnya menghancurkan hubungan kekeluargaan dan persaudaraan.

c. Putusan pengadilan membingungkan

Disamping putusan tidak menyelesaikan masalah, putusan pengadilan juga sering membingungkan. Terkadang tanpa alasan yang kuat dan masuk akal pengadilan menjatuhkan putusan ganti rugi yang luar biasa besarnya. Sebaliknya meskipun ada alasan dan dasar hukum yang kuat, ganti rugi

yang ditentukan terlampau kecil hingga tidak mempunyai nilai dan arti.

- d. Putusan pengadilan sering tidak memberi kepastian hukum (uncertainty) dan tidak bisa diprediksi (unpredictable)

Ini artinya putusan-putusan pengadilan sering mengandung disparitas antara yang satu dengan yang lain, misalnya pada kasus yang sama (similar cases) dijumpai putusan yang sangat jauh berbeda antara satu dengan yang lain, dikarenakan hakimnya berbeda. Padahal dalam kehidupan negara hukum dan masyarakat demokrasi menganut asas *equal treatment* dan *equal before the law*, artinya sama kedudukan dan penerapan hukum yang dilakukan terhadap semua orang.

- e. Kemampuan para hakim bersifat generalis

Hal ini menyangkut kemampuan dan profesi para hakim. Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas, hanya dibidang hukum. Padahal kasus-kasus yang diajukan dalam pengadilan bersifat kompleks, artinya bukan hanya dibidang hukum saja tapi juga dibidang

perekonomian (akuntansi dan perkreditan), elektronik, konstruksi bangunan jalan dan gedung. Dengan memperhatikan kemampuan para hakim yang hanya manusia generalis maka sangat mustahil dapat mampu menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas berbagai bidang yang ada.

Menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada pada citra pengadilan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka perlu diarahkan kegiatan pada pemikiran dan upaya memperbaiki sistem peradilan, agar masyarakat bisa memandang kehadiran dan keberadaan pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang efektif dan efisien.

BAB III

PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI

ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)

MEMBERIKAN RASA PERLINDUNGAN HUKUM

1. Keberadaan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Indonesia dan Tujuannya.

ADR mempunyai daya tarik yang khusus di Indonesia karena keserasiannya dengan sistem sosial-budaya tradisional yang berdasarkan musyawarah mufakat¹⁶. Penggunaan model ADR yang menyangkut penyelesaian sengketa yang bersifat "out of court settlement model" memiliki peranan penting terutama terhadap sengketa bisnis, sebab cara penyelesaian sengketa yang dituntut dunia bisnis adalah sederhana, cepat dan biaya ringan. Ada beberapa alasan yang dapat dilihat sebagai pengembangan ADR di Indonesia, antara lain¹⁷:

¹⁶ Basuki Rekso Wibowo, Hand Out: Suatu Pemahaman Dasar Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, h. 3

¹⁷ ibid. h. 2

- Faktor ekonomis

ADR memiliki potensi sebagai sarana penyelesaian yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.

- Faktor ruang lingkup yang dibahas

ADR memiliki kemampuan untuk membahas ruang lingkup atau agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel. Hal ini dapat terjadi karena aturan permainan dikembangkan serta ditentukan oleh para pihak, sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan para pihak yang bersengketa.

- Faktor pembinaan hubungan baik

ADR mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya pembinaan hubungan baik antar manusia.

Konsep ADR beberapa tahun ini di Indonesia mendapat perhatian lebih, hal ini dikarenakan oleh beberapa hal. **Pertama** adalahantisipasi perdagangan bebas di abad 21 dimana perusahaan asing yang sudah terbiasa dengan penggunaan metode ADR akan

cenderung untuk mencari jasa ini juga di Indonesia. **Kedua** adalah karena semakin meningkatnya jumlah dan bobot sengketa di masyarakat. **Ketiga** disebabkan oleh bertumpuknya permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Keberadaan ADR bertujuan¹⁸:

- mengurangi beban perkara di pengadilan
- meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa
- efisiensi waktu, tenaga dan biaya
- memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan dapat diterima oleh semua pihak.

Sehingga dengan adanya ADR diharapkan mampu memperlancar jalur pengadilan.

2. Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat Memberikan Rasa Perlindungan Hukum.

Masyarakat sangat mendambakan sistem penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, serta mampu memberikan rasa perlindungan hukum bagi

¹⁸ *ibid*, h. 1

mereka. Hal ini dapat ditemukan pada sistem ADR. Keuntungan yang sering muncul dalam Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah¹⁹ :

- Sifat kesukarelaan dalam proses.

Para pihak percaya bahwa ADR mampu memberikan jalan keluar yang potensial untuk menyelesaikan masalah dengan lebih baik daripada melalui prosedur pengadilan (litigasi). Secara umum tidak seorangpun dipaksa untuk menggunakan prosedur-prosedur ADR.

- Prosedur yang cepat.

Karena prosedur ADR bersifat kurang formal, maka pihak-pihak yang terlibat mampu untuk menegosiasikan syarat-syarat penggunaannya. Hal ini mencegah penundaan dan mempercepat proses penyelesaiannya.

- Keputusan Non-Judicial.

Wewenang untuk membuat keputusan dipertahankan oleh pihak-pihak yang terlibat daripada didelegasikan kepada pembuat keputusan dari pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang

¹⁹ *ibid.* h. 3

terlibat mempunyai lebih banyak kontrol terhadap hasil-hasil sengketa.

- Kontrol oleh Manajer yang paling tahu tentang kebutuhan organisasi.

Prosedur ADR menempatkan keputusan di tangan orang-orang yang mempunyai posisi. Pembuatan keputusan oleh pihak ketiga seringkali meminta bantuan seorang hakim, juri atau arbitrator untuk membuat keputusan yang mengikat mengenai satu isu yang tidak dikuasainya.

- Prosedur rahasia (confidential).

Prosedur-prosedur ADR bisa memberikan jaminan kerahasiaan yang sama besarnya bagi setiap pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang bersengketa bisa berpartisipasi dalam prosedur ADR, dengan tetap dilindungi haknya untuk mempresentasikan kasus mereka di pengadilan pada kesempatan berikutnya tanpa harus takut bahwa data yang diungkapkan dalam prosedur ini akan digunakan untuk menyerang balik mereka.

- Fleksibilitas yang lebih besar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah.

Prosedur ADR memberi kesempatan bagi para pembuat keputusan dari setiap pihak untuk menyiasati penyelesaian-penyelesaian yang bisa lebih baik mempertemukan kepentingan-kepentingan mereka dan diterima oleh semua pihak, daripada jika menjalankan penyelesaian yang dilakukan oleh seorang pihak ketiga.

- Hemat waktu.

Dengan kelambatan yang cukup berarti dalam menunggu kepastian tanggal persidangan, prosedur ADR memberikan kesempatan-kesempatan yang lebih baik untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan litigasi.

- Hemat biaya.

Prosedur-prosedur ADR tidak semahal litigasi. Biaya ditentukan oleh kegunaan dan besarnya waktu yang dipakai, dan pihak ketiga yang netral rata-rata memasang tarif yang lebih rendah untuk mengganti waktu yang mereka habiskan daripada membayar para pengacara hukum.

- Perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja.

Cara-cara penyelesaian sengketa ADR, yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dinegosiasikan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pihak yang terlibat, lebih jauh mampu untuk mempertahankan hubungan-hubungan kerja yang sekarang sedang berjalan maupun untuk yang mendatang daripada prosedur menang/kalah seperti misalnya litigasi. Jika hubungan kerja di masa depan lebih penting, maka cara penyelesaian melalui negosiasi merupakan pemecahan masalah yang terbaik.

- Tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan.

Pihak-pihak yang telah mencapai kesepakatan pada umumnya cenderung untuk mengikuti dan memenuhi syarat-syarat kesepakatan. Faktor ini membantu para peserta dalam prosedur APS untuk menghindari litigasi ulang yang mahal.

- Kesepakatan-kesepakatan yang lebih baik daripada sekedar kompromi atau hasil yang diperoleh dari cara penyelesaian kalah/menang.

Cara penyelesaian sengketa yang dirundingkan melalui negosiasi berwawasan kepentingan, pada umumnya lebih memuaskan semua pihak yang mengkompromikan keputusan mereka, dimana para pihak yang terlibat saling berbagi keuntungan dan kerugian.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat terbukti bahwa model Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR) mampu memberikan rasa perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, khususnya konsumen selaku pembeli mobil. Sebab dalam model ADR ini para pihak yang bersengketa (pemilik showroom dan konsumen) telah menentukan sendiri jalan keluar yang telah disetujui bersama dengan saling membagi keuntungan dan kerugian masing-masing, sehingga hasil-hasilnya dapat diterima dan memuaskan bagi semua pihak.

Cara-cara penyelesaian sengketa ADR menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dinegosiasikan, dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pihak yang terlibat sehingga mampu untuk mempertahankan

hubungan-hubungan kerja tanpa harus menumbuhkan bibit dendam dan permusuhan, serta kebencian.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas mengenai aspek hukum penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli mobil bekas dapat diambil kesimpulan :

- a. Pilihan model penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan maupun di luar lembaga pengadilan yang dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR), antara lain negosiasi, mediasi dan arbitrase, adalah merupakan jawaban penyelesaian sengketa perdagangan yang dituntut dunia bisnis jual beli mobil.
- b. Proses penyelesaian sengketa dengan model Alternative Dispute Resolution (ADR) mampu memberikan rasa perlindungan hukum, hal ini dikarenakan dalam model ADR ini para pihak yang bersengketa telah menentukan sendiri jalan

keluar yang telah disetujui bersama dengan tetap memperhatikan kepentingan masing-masing pihak, sehingga hasil-hasilnya dapat diterima dan memuaskan bagi semua pihak, serta mampu untuk mempertahankan hubungan-hubungan kerja tanpa harus menumbuhkan bibit dendam dan permusuhan, serta kebencian.

2. Saran

- a. Penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan diharapkan mampu untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan apa yang kita cita-citakan yaitu sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah. Hal tersebut dapat didukung dengan jalan menyaring atau mengurangi kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung agar tidak terjadi penumpukan perkara.
- b. Masalah perlindungan konsumen di Indonesia masih tergolong masalah baru, sehingga wajar apabila masih banyak konsumen yang belum menyadari hak-haknya. Kesadaran akan hak sebenarnya sejalan dengan kesadaran hukum. Oleh karena itu,

diharapkan agar masyarakat mendapatkan pendidikan konsumen, tidak harus melalui pendidikan formal, akan tetapi dapat ditempuh dengan pesan melalui media massa ataupun melalui kegiatan lembaga swadaya masyarakat.

Disamping itu, pemerintah hendaknya lebih gencar mensosialisasikan UUPK. Dengan demikian, para konsumen akan mengetahui apa saja yang menjadi haknya apabila dirugikan oleh produsen.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Harahap, M.Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

Nasution, A.Z., *Hukum dan Konsumen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Nieuwenhuis, J.H., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Suarabaya, 1985.

Riyanto, Anthonius, *Cermat Berinvestasi: Kiat Membeli Mobil Bekas*, Kawan Pustaka, Jakarta, 2001.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1998.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

Wibowo, Basuki Rekso, *Handout: Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang di Indonesia*.

Handout: Suatu Pemahaman Dasar
Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, LNRI Tahun 1999 Nomor 42 - TLNRI Nomor 3821.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LNRI Tahun 1999 Nomor 138 - TLNRI Nomor 3872.